

DAFTAR PUSTAKA

- A, Indira Retno, Oemar Moechtar, & Angela Melani. W. 2022. *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah (Konvensional dan Elektronik)*. Universitas Airlangga Surabaya: Perspektif Hukum, Vol. 22, No. 1.
- Aji, Aniko, Jefik Zulfikar Hafizd, dan Ammar Abdullah Arfan. 2025. *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. t. p. Vol 3, no. 2.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz – 6: Damaskus, Dar al-fikr).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr.
- Ambarwati, Reni & Devi Siti Hamzah Marpaung. 2021. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan (Non Litigai) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan*.
- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andri, B. 2024. *Tinjauan yuridis ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa atas tanah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019*. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 3(1).
- Andryawan, A, dkk. 2024. *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt. G/2022/PN Tlg*. Ranah Penelitian: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Multidisiplin, 7 (1).
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Aryansa, A. 2023. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah*. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(1).
- Ashwarina, Najwa, dkk. 2024. *Pengadilan Tata Usaha Negara*. Sumatra Utara: (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara).
- Auri. 2014. *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I. Volume 2.
- Aziza, M. J., Shaleh, C., & Alamsyah, T. 2025. *Fungsi pengawasan ombudsman perwakilan Jawa Barat dalam pelayanan publik ditinjau dari siyasah dusturiyah*. Jurnal Ilmiah: Vol. 13 No. 01.

- Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. 2024. *Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. *UNES Law Review*, 6(4).
- B, Juwita Tarrochi. Budi Santoso. dan irawati. 2020. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi Berdasarkan Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*. *Jurnal: Notaris*. Universitas Diponegoro. Vol. 13.
- B, R, Sabrina Dhea. 2021. *Penyelesaian Sengketa Mengenai adanya sertifikat Ganda terhadap hak Milik Atas tanah pada kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang*.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 34 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan*.
- Batubara, S., & Purba, O. 2013. *Arbitrase Internasional*. Raih Asa Sukses.
- Bounsui, I Gede, dkk. 2021. *Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara*. Denpasar Bali: *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 1).
- Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. No. 2452; Muslim. *Shahih Muslim*. No. 1610
- Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. No. 2680; Muslim. *Shahih Muslim*. No. 1711
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dewi, Alya Paramiswara Tungga. 2023. *Perlindungan Konsumen dalam Sengketa kasus bangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan (Studi Kasus Perumahan Taman Eidelweis kalten)*.
- Direktori Putusan, Mahkamah Agung dan Republik Indonesia. 2023. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PUTUSAN Nomor 171/G/2023/PTUN.SBY*.
- Djazuli A. 2003. *Fiqh Siyasah: Edisi revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Djazuli A. 2007. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Evaluasi Pemetaan Konflik Pertanahan Dalam Rangka Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah. diakses 9 November 2024.
- F, Andrianto. 2020. *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*. 31(1).
- F, Fatmawati, & Sultan, L. 2023. *Telaah Siyasah Syar'iyah atas Sengketa Tanah*. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*. 7(2).

- Fathanah, Nurul, M Akhsanuddin. 2021. *Perjanjian Ekstradisi Persektif Fiqih Siyasah*, sekolah tinggi agama Islam: Jurnal Hukum Islam, Vol 10, No 2.
- Fatmawati. 2015. *Fiqih Siyasah*. (Gowa: Pusaka Almaida)
- Fikriana, A dan MK Rezki. 2024. *Etika Politik dan kualifikasi calon Legislatif dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah*, Aladalah: Jurnal politik, sosial, hukum dan Humanira, Vol. 2, No 1.
- Fitria, D. U. L., & Rochim, F. 2025. *Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah*. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 10(1).
- Hadimulyono. 1997. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM: Jakarta.
- Halim, Abd. 2013. *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS).
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan yang layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung).
- Hamzani, Achmad Irwan. 2021. *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management).
- Hanifah, A. N, dkk. *Analisis Putusan Nomor 70/Pdt. G/2018/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tanah Hak Milik Nomor 463*. Notary Law Review, 1(1), hal. 60.
- Harahap, M Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hardian, Michell Eko. 2015. *Penggunaan Wewenang Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Nanga Tempunak Dengan Desa Anggah Jaya*. Perahu: Penerangan Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1.
- Haryono, dalam Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Iman, Rifqi Qowiyul & Joni. 2024. *Kekuasaan Yudikatif dalam Islam (Qadha, Tahkim, Muzhalim dan Hisbah)*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu)
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2.
- Jafar, Wahyu. 2018. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol.3, No 1.
- Jessica, Dina dan Ana Silviana. 2023. *Penyelesaian Sengketa Hak Milik Terkait Penguasaan Tanah Bangunan Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang*. Jurnal Hukum 39, No 1.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34, Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2019. *Komnas HAM dukung penyelesaian sengketa lahan warga pasuruan-TNI AL*.
- Kurniati, K, dkk. 2021. *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 3(2).
- Lavan, Yohana Oktaviani, dkk. 2021. *Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Dinamika Politik Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.9, no.1.
- Madril, Oche & Jerry Hasinanda. 2021. *Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung*. Universitas Indonesia: Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masriani, YT. 2022. *Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak*. Jurnal Tinjauan Hukum USM, 5 (2).
- Maskufa. 2024. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Al-Khraj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah, Vol 6, No. 1.
- Mauliza, T. 2024. *Analisis Yuridis Putusan Nomor 1244 K/PID/2017 tentang Sengketa Penguasaan Tanah dalam Perspektif Kesalahan Penerapan Hukum oleh Hakim*. Bulletin of Community Engagement, 4(3).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mujar, Zada Khamami Ibnu Syarif. 2008. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga).
- Mukaromah, Nurul, Dkk. 2024. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah: Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang*. Universitas Islam Malang: Dinamika Vol. 30, No. 2.
- Mulyaningsih, R. 2022. *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lex Renaissance, 7 (2).
- Murad, Rusmadi. 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.

- Myaskur, M., & Ubaidillah, N. 2024. *Pendahuluan. Pembahasan tentang Perbandingan Hukum Siyasah dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada*. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 9(1).
- Nugroho Adi, dan Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Nugroho, Rico Setyo. 2025. Islam Dan Ham: Perspektif Keadilan. Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis dan Praktis.
- Nurfaqih, F, dkk. 2024. *Analisis Asas Kepastian Hukum Kebijakan Pelayanan Administrasi Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(2).
- Isnur, Eko Yulian. 2012. *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan Tanah*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Iza, Ika Nurul, dkk. 2022. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang*. Jurnal Civic Hukum, 7(1).
- Peraturan Kepala BPN. 2012. Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 butir 2 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Persada.
- Pasaribu, Kurniawan Hafif. 2024. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96 / G / 2023 / PTUN.MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Vol 6, no. 4: 11749–56.
- Pemerintah RI. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Pasal 7 Ayat 1-2.
- Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia murni dijalankan oleh Lembaga Yudikatif dan berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa; kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
- Poetra, Kartasa. G. 1986. *Masalah Pertanhan di Indonesia*, Jakarta.PT.Bina Aksara.
- Pulungan, J Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Purba, Hasim. 2010. *Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan*, Jurnal LawReview, V. X No 2. UPH.
- Putri, K. R, dkk. 2025. *Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik di Pemerintahan Kota Bandung dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(4).
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2021/PN.SBY. 2021.
- R, Mohamad Bagus Rio, dkk. 2021. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia, Jurnal Cakrawla Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial Vol.5, no.2.
- Rahmadi. 2010. *Takdir Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Rappe, A., & Ishak, N. 2024. *Analisis Fiqh Siyasah Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, 5(3).
- Rasyid, M. R., & Winanti, A. 2023. *Perlindungan hukum terkait pemegang hak milik atas tanah dalam kepemilikan sertifikat ganda (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(4).
- Ratna, Sambawa Ningrum Herlina. 2024. *Analisis Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 9 (1).
- Royani A, dkk. 2025. *Manajemen Konflik Dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Filsafat Ilmu*, Banten: Jurnal Inovasi Pendidikan IS, Vol 4. No 4.
- Samuddin, Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi; Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, (Jakarta: Gozian Prezz).
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, Cet 2).
- Sari, W. 2023. *Problematisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi*. Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 3(1), 5.
- Shofiyyah, Roidotus. 2024. *Kajian Perbandingan dengan Konsep Fiqih siyasah*, Sidoarjo: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora, Vol 3 No 3.
- Shofiyah, R., dkk. 2024. *Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 11(1).
- Soetikinjo, Imam. 1994. *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, Cet, 21, (Depok: Rajawali Pers.)
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar)
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta).
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta: Kompas.
- Sumarto. 2012. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-WinSolution oleh Badan Pertanahan nasional RI*, Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September.
- Surya, I. G. N. K. J. 2025. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Restorative Justice Di Polsek Kuta Utara. *Jurnal Yusthima*, 5(1).
- Syam, Sitti Mutmainnah, Dian Furqanni tenrillawa. 2022. *Peneraan Prinsip Akuntabilitas Good Governace pada Pelayanan Publik*, Universitas Sulawesi Barat *Jurnal Hukum*, Vol 5 No. 3.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga)
- T, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. 2024. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Taufik, T, dkk. 2023. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Yang Layak Dan Adil Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Langsa: Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1551. K/Pdt/2021 Dan Nomor 1396. K/Pdt/2021. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1 (2).
- Trisakti, Fadjar, dkk. 2021. *Transparansi dan Kepentingan Umum*. Bandung: *Jurnal Dialektual Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9 – Pasal 55.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Wahyudi. 2024. *Peran Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
- Widiawati, Ani, dkk. 2024. *Analisis terhadap kasus Hukum perdata Dalam Sengketa Lahan pertanahan*, *Jurnal Pahlawan* Vol 7, No. 1.

- Wiyano, R. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua.
- Z, Muhammad Aziz, I Gusti K. A. R.H, Isharyanto. 2019. *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi*. Universitas Islam Indonesia: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26 No 3.